



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI BARAT DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 2016- 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan - kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggara manajemen kinerja secara baik; dan

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/(Rencana Kerja);
- b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Kinerja, dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021;
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai urusan, fungsi dan tugas.

- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - Kebutuhan data statistis pemerintah; dan
  - Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 24 Agustus 2018.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 17.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI BARAT  
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 2016- 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (RUMUS)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatnya infrastruktur dasar, perhubungan dan telekomunikasi di wilayah Kutai Barat	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Kab. dalam kondisi Baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bisa terlayani Air Minum}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase kenaikan arus penumpang	$\frac{\text{Jumlah arus penumpang tahun } n}{\text{Jumlah arus penumpang } n - 1} \times 100 \%$	Dinas Perhubungan	-

		Prosentase sarana telekomunikasi Kecamatan yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jmlh Sarana Telekomunikasi Kec.yg berfungsi baik}}{\text{Jumlah Kecamatan Seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Wilayah sesuai Peruntukannya	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Ber- IMB}}{\text{Jumlah bangunan seluruhnya}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Rasio ruang terbuka hijau per Satuan luas wilayah ber HPL dan HGB	$\frac{\text{Jumlah luas RTH}}{\text{Jumlah luas wilayah HPL dan HGB}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
3.	Meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas	Index Pendidikan dalam IPM	$\text{IPM} = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$ <p>Dimana :</p> $X_{(1)} = \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} = \text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3} (\text{Indeks Melek Huruf}) + \frac{1}{3} \text{Indeks rata - rata lama sekolah}$ $X_{(3)} = \text{Indeks Standar Hidup Layak}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS	-
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Index Harapan Hidup Dalam IPM	$\text{IPM} = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$ <p>Dimana :</p> $X_{(1)} = \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} = \text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3} (\text{Indeks Melek Huruf}) + \frac{1}{3} \text{Indeks rata - rata lama sekolah}$ $X_{(3)} = \text{Indeks Standar Hidup Layak}$	Dinas Kesehatan/BPS	-

5.	Terselenggaranya Pemerintahan yang semakin Transparan dan Akuntabel serta semakin membaiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Hasil Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN & RB	Bagian Organisasi Setkab	-
		Hasil Evaluasi LPPD	Hasil EKPPD dari Kemendagri	Bagian Pemerintahan Setkab	-
		Opini BPK	Hasil Evaluasi LKPD dari BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-
		Level APIP	Meningkatnya Level APIP dari 1 ke 3	Inspektorat Daerah	-
		Rata-rata nilai IKM	$\frac{\text{Jumlah nilai IKM}}{\text{Jumlah OPD yang melakukan survey IKM}} \times 100\%$	Bagian Organisasi Setkab	-
6.	Terciptanya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	-
7.	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai PMA	Nilai PMA dalam Ribu USD dalam setahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
		Nilai PMDN	Nilai PMDN dalam Juta dalam setahun		
8.	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian masyarakat lokal	Jumlah UMKM	Jumlah Pembentukan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
9.	Meningkatnya Pendapatan wilayah	PDRB per Kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk pertengahan tahun}}$	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian, DPM&TSP, DPU & PR dan PD	-



				tekait	
10.	Meningkatnya Peran sektor Pertanian dalam perekonomian Kutai Barat	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	-
11.	Meningkatnya ketahanan dan stabilitas harga pangan	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan	-
12.	Berkembangnya Obyek dan Daya Tarik Wisata Daerah	Jumlah Wisatawan	Jumlah wisatawan yang berkunjung untuk tujuan wisata ke Kutai Barat dalam setahun	Dinas Pariwisata	-
		Lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan dalam setahun	Dinas Pariwisata	-
13.	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Angka pengangguran	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenakertrans	-
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kualitas udara ambint dan kualitas air (%)	$\text{Rata2 peningkatan kualitas udara ambint dan air} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	-
15.	Menurunnya kemiskinan kemiskinan di kutai Barat	Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan	(100-angka Kemiskinan)	Dinas Sosial/BPS	-
16.	Terciptanya Rasa Aman, Toleransi saling pengertian dan kebersamaan antar etnis dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	-

17	Terciptanya peningkatan Pelayanan pada masyarakat kampung.	Prosentase Kampung yang dapat menyelenggarakan Pengelolaan Pemerintah Kampung secara Tertib	$\frac{\text{Jumlah Kampung yang Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah seluruh Kampung}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
18.	Terciptanya partisipasi dan peran aktif pemuda, perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Jumlah cabang olahraga berprestasi	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi atau tingkat Nasional	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja Perempuan}} \times 100\%$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat  
  
**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 17 TAHUN 2018  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI BARAT DAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan dan pemakaman dan penerangan jalan umum.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan dan pemakaman dan penerangan jalan umum;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan dan pemakaman dan penerangan jalan umum;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan dan pemakaman dan penerangan jalan umum;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Perhubungan dan Telekomunikasi di wilayah Kutai Barat.	Meningkatnya Keterbukaan Akses antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain.	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah Jalan dalam Kondisi Baik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Proporsi Panjang Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Panjang Jembatan}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Penduduk berakses Air Minum	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berakses Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
			Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERHUBUNGAN

TUGAS

: Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang perhubungan.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan sungai, danau, penyeberangan, lalu lintas angkutan jalan, data dan informasi perhubungan dan kebandarudaraan;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan, lalu lintas angkutan jalan, data dan informasi perhubungan dan kebandarudaraan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan sungai, danau, penyeberangan, lalu lintas angkutan jalan, data dan informasi perhubungan dan kebandarudaraan;
4. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar perhubungan dan telekomunikasi di wilayah Kutai Barat	Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah Penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai, darat dan udara dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Jumlah izin KIR Angkutan Umum yang dikeluarkan dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Jumlah Orang yang terangkut angkutan Umum :	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai, darat dan udara dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Laut/sungai (orang)	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai, dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Darat (orang)	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui darat dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Udara (orang)	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui udara dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah Barang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai, darat dan udara dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Laut/sungai (Ton)	Jumlah Barang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai, dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
			Darat (Ton)	Jumlah Barang masuk dan keluar yang terangkut melalui darat dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-
Udara (Ton)	Jumlah Baraang masuk dan keluar yang terangkut melalui udara, dalam 1 tahun		Dinas Perhubungan	-			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang teknologi informasi dan komunikasi, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi public, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang teknologi informasi dan komunikasi, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang teknologi informasi dan komunikasi, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian;
4. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar perhubungan dan telekomunikasi di wilayah Kutai Barat	Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi	Persentase Kampung yang Bisa Mengakses Radio	$\frac{\text{Jumlah Kampung yang bisa mengakses layanan radio}}{\text{Jumlah Kampung Seluruhnya}} \times 100\%$		Dinas Komunikas dan Informasi	-
			Jumlah Visitor Website Pemda	Jumlah Visitor yang mengakses Website resmi Pemda dalam 1 Tahun		Dinas Komunikasi dan Informasi	-
			Persentase e-Government yang Berjalan dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi e - Gov yang beroperasi}}{\text{Jumlah Aplikasi e - Gov yang ada}} \times 100\%$		Dinas Komunikasi dan Informasi	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Peningkatan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai peruntukannya.	Meningkatnya Pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB}}$		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-
			Persentase Penduduk berakses Air Minum	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berakses Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$			-
			Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Tempat Pembuangan Sampah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-
			Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan;  
 4. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;  
 5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 6. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA SKPD					
1.	Peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak	Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya Sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun dimasa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
			Angka Partisipasi Murni	$\frac{\text{Jumlah Murid berusia } 7 - 12,13 - 15,16 - 18 \text{ thn}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7 - 12,13 - 15,16 - 18 \text{ thn}} \times 100 \%$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
			Angka Partisipasi Kasar	$\frac{\text{Jumlah Murid SD, SLTP, SLTA}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7 - 12,13 - 15,16 - 18 \text{ thn}} \times 100 \%$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
			Bangunan Sekolah Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Sekolah Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Bangunan Sekolah Seluruhnya}} \times 100 \%$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2.	Berkembangnya nilai Budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualitas adat budaya lokal	Upaya pengembangan nilai budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualitas adat budaya lokal	Jumlah group Kesenian	Cukup Jelas		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cukup Jelas		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH  
TUGAS

: DINAS KESEHATAN

: Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesehatan, Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan, Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Kesehatan, Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan, Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Kesehatan Keluarga dan masyarakat	Usia Harapan Hidup			Dinas Kesehatan/BPJS	-
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Ibu Bersalin			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Bayi Baru Lahir			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Kesehatan Balita				-
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Ibu pada usia lanjut			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Dinas Kesehatan	-
		Menurunnya Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Kesehatan dengan resiko terinfeksi HIV			Dinas Kesehatan	-
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular lainnya			Dinas Kesehatan	-
	Pelayanan Kesehatan dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat			Dinas Kesehatan	-		



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH  
TUGAS  
FUNGSI

- : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
: Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  
: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tersedianya Layanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas dan merata	Rata-rata Jumlah anak Perkeluarga (TFR/Total Fertility Rate)	$\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah Keluarga}}$	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
			Cakupan Akseptor KB Aktif terhadap Pasangan Subur	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB		
		Meningkatnya Intensitas Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki - laki}} \times 100$	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	$\frac{\text{Jumlah Korban Perempuan yg dapat pener}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
			Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan	$\frac{\text{Jumlah Korban Anak yg dapat Penanganan}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		Terbentuknya Kabupaten dan Kecamatan Layak Anak		Jumlah Kabupaten Layak anak yang terbentuk Disesuaikan dengan target tahunan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH

: SEKRETARIAT DPRD

TUGAS

: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten;

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Terselenggaranya pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel serta membaiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Fasilitasi Perda yang dihasilkan	Peraturan Daerah yang dihasilkan dalam 1 tahun		Sekretariat DPRD	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH

: SEKRETARIAT DAERAH

TUGAS

: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

FUNGSI

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas erangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Terselenggaranya pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel serta membaiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan di Bidang Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan PATEN	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan PATEN meningkat tiap tahun diharapkan di akhir RPJMD 16 Kecamatan sudah melaksanakn PATEN		Bagian Organisasi	-
			Penyampaian Dokumen LPPD tepat waktu	Penyampaian LPPD ke Pemprov Kaltim tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret		Sekretariat Daerah / Inspektorat	-
			Jumlah Kebijakan Tentang Penetapan Batas Wilayah	Jumlah SK.Penetapan Batas antar Kecamatan meningkat tiap tahun dari 5 menjadi 16 kecamatan diakhir RPJMD		Bag Pemerintahan	-
		Terselenggaranya Penataan Perundang - Undangan	Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan	Jumlah Penerbitan Perda meningkat dari 10 Perda menjadi 60 Perda di Akhir RPJMD		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Kampung Sadar Hukum	Jumlah Kampung sadar Hukum Meningkat di tiap Kecamatan dari 1 menjadi 5 Kecamatan di Akhir RPJMD		Sekretariat Daerah	-
			Jumlah Penyelesaian Perkara Hukum	Meningkatnya jumlah penyelesaian Perkara Hukum dari 3 Perkara menjadi 18 Perkara pertahun diakhir RPJMD			-

	Terlaksananya Layanan Administrasi dibidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	Meningkatnya Prosentase penerima Bantuan social yang tepat sasaran dari 70% menjadi 90% di akhir RPJMD			-
		Jumlah Penerima Hibah	Meningkatnya Prosentase penerima Hibah yang tepat sasaran dari 70% menjadi 90% di akhir RPJMD			-
	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dan penanaman modal	Jumlah Usaha Perkebunan yang dinilai	Meningkatnya Jumlah Usaha Perkebunan dari 1 menjadi 6 di akhir RPJMD			-
		Stabilitas Harga	Terpantaunya stabilitas harga di 4 pasar			-
		Laporan Kinerja PERUSDA	Meningkatnya Jumlah Laporan Kinerja PERUSDA dari 1 menjadi 4 di akhir RPJMD			-
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Jumlah Aplikasi dari 1 menjadi 5 di akhir RPJMD			-
	Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	Jumlah Izin/ Rekomendasi PKP2B/ IUPK	6 Izin/Rekomendasi IUPK pertahun  75 Izin IUP			-
	Tersedianya Kebijakan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas Kelembagaan	Meningkatnya Level Maturitas Kelembagaan dari 1 menjadi 3 di akhir RPJMD			-
		Kepemilikan Sertifikasi LPSE	Meningkatnya Sertifikasi LPSE dari 3 menjadi 16 di akhir RPJMD			-
	Penguatan Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah/ UPTD yang dilakukan Penataan	Meningkatnya Jumlah Penataan Kelembagan dari 29 menjadi 48 PD/UPT di akhir RPJMD			-
		Jumlah Perangkat Daerah yang disurvei	Meningkatnya JUmlah Perangkat Daerah yang disurvei dari 2 menjadi 10 di akhir RPJMD			-
		Penyampaian LKjIP Perangkat Daerah Tepat	Meningkatnya PD yang menyampaikan LKjIP tepa waktu dari 75% menjadi 100 % di akhir RPJMD			-

			Waktu				
Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/ Pelatihan Bidang Tugas dan Fungsinya	Meningkatnya Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Bidang Tugas dan Fungsinya dari 50% menjadi 90% diakhir RPJMD					-
	Jumlah Kebijakan yang diterbitkan dibidang Aparatur	Meningkatnya Jumlah Kebijakan dibidang Aparatur dari 1 Perbup menjadi 2 Perbup di Akhir RPJMD					-
	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	Meningkatnya Prosentase Kehadiran Pegawai dari 70% menjadi 95% diakhir RPJMD					-
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diinventarisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diinventarisasi meningkat dari 80% menjadi 95% diakhir RPJMD					-
	Tersedianya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian meningkat dari 80% menjadi 95% diakhir RPJMD					-
	Persentase Realisasi Anggaran	Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran dari 72% menjadi 98% diakhir RPJMD					-
Terselenggaranya Layanan Kehumasan Sesuai Dengan Standar Keprotokolan	Jumlah Pendampingan Kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah Pendampingan Kegiatan Pimpinan Daerah dari 90% menjadi 100% diakhir RPJMD					-
	Jumlah Berita yang Dipublikasikan pada Media Massa	Jumlah Berita yang dipublikasikan meningkat dari 10 menjadi 11 Media Masa di Akhir RPJMD					-
	Jumlah kegiatan Kepala Daerah yang diliput	Jumlah Kegiatan Kepala Daerah Yang diliput meningkat dari 90% menjadi 100% diakhir RPJMD					-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 – 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah.

FUNGSI : 1. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;  
 2. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;  
 3. Pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;  
 4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  
 5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Terwujudnya tata perencanaan pembangunan yang baik yang didukung oleh system pengendalian system yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.	Tersedianya Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Adanya dokumen RPJPD yang sudah ditetapkan dengan Perda		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
			Tersedianya Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Adanya dokumen RPJPD yang sudah ditetapkan dengan Perda		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
			Tersedianya Dokumen RKPDP yang ditetapkan dengan Perda	Adanya dokumen RPJPD yang sudah ditetapkan dengan Perda		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-

					Daerah	
		Prosentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKP	$\frac{\text{Jumlah Program RKP Tahun berkenan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan thn berkenan}} \times 100$		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
		Tersedianya data-data/informasi/statistic daerah	Cukup Jelas		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Cukup Jelas		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
		Terlaksananya penelitian,kerjasama dan pengembangan daerah yang berkelanjutan beserta data pendukungnya	Cukup Jelas		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
		Tersedianya dokumen data base pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Cukup Jelas		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
		Tersedianya dokumen dan data infrastruktur untuk menunjang pengembangan sarana dan prasarana wilayah	Cukup Jelas		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan;
  2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan;
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian ;
  5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
  6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  7. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA PD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Terciptanya tertib administrasi kependudukan dan catan sipil	Penataan dan penguatan system administrasi kependudukan	Persentase Pengurusan KTP Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KTP Tepat Waktu}}{\text{Jumlah KTP yang di Terbitkan}} \times 100$		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
			Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk keseluruhan}} \times 100$		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
			Rasio Pasangan Berakte Nikah	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Nikah berakte Nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA PD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Terciptanya tertib penyelenggaraan administrasi kearsipan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Menciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/pelestarian dokumen/arsip daerah.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Arsip yg dikelola secara Baku}}{\text{Jumlah arsip keeluruhan}} \times 100$		Dinas Arsip dan Perpustakaan	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman modal, dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman modal, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Penanaman modal, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman modal, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan  
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA PD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Meningkatnya Investasi Daerah dan perbaikan pelayanan mekanisme perizinan yang lebih cepat.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (faster), lebih mudah (easier) dan lebih murah (cheaper)	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional : PMA (US\$) PMDN (Juta Rp)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional : - PMA (US\$) - PMDN (Juta Rp)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
			Rasio Daya serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA /PMDN}} \times 100$		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat Lokal	Upaya untuk Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha kecil Menengah di Kutai Barat, sehingga mampu menjadikan soko guru perekonomian.	Prosentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-
			Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah UMK aktif non BPR/LKM UKM		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita Meningkat	Nilai skor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kubar	$\frac{\text{Nilai Industri Non Formal s.d Tahun (n)} - \text{jumlah Industri Non Formal s.d Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Industri Non Formal sd Tahun (n-1)}} \times 100\%$		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-
			Nilai Sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Kubar	$\frac{\text{Nilai Ekspor Bersih Tahun (n)} - \text{Nilai Ekspor Bersih (n-1)}}{\text{Nilai Ekspor Bersih Tahun (n-1)}} \times 100\%$		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-
			Persentase Ketersediaan Sembako	$\frac{\text{rata2 ketersediaan sembako dan barang lainnya Tahun (n)} - \text{Rata-rata sembako dan barang lainnya Tahun (n-1)}}{\text{Rata2 Sembako dan Barang Lainnya Tahun (n-1)}} \times 100\%$		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-
			Presentase UTTP	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera Sah Tahun (n)} - \text{Junlah UTTP Bertanda Tera Sah Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah UTTP bertanda tera Sah Tahun (n)} - \text{Junlah UTTP Bertanda Tera Sah Tahun (n-1)}}$		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-
			Jumlah SIUP terdaftar	Jumlah SIUP terdaftar di Disdagkop UKM		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
  5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;
  6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam artian luas dalam perekonomian kutaiBaratl	Meningkatnya efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian.	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per tahun (ton)	$\frac{\text{Produksi tanaman padi, bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi, pangan utama utama lokal lainnya (Ha)}}$		Dinas Pertanian	-
			Meningkatnya Jumlah Produksi tanaman perkebunan (Karet meningkat 5% pertahun, produksi sawit meningkat 3% pertahun (ton), produksi kakao meningkat 2% pertahun (ton).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Jumlah Produksi Karet 5% pertahun (ton)</li> <li>- Meningkatkan Jumlah produksi sawit 3% pertahun (ton)</li> <li>- Meningkatkan Jumlah Produksi Kakao 2% pertahun (ton)</li> </ul>		Dinas Pertanian	-

			Meningkatnya Jumlah Produksi padi sawah dan padi ladang (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Jumlah Produksi Padi sawah sebesar 1.02% pertahun (ton)</li> <li>- Meningkatnya Jumlah Produksi Padi Ladang 1.02% pertahun (ton)</li> </ul>		Dinas Pertanian	-
			Meningkatnya surveilliance dan identifikasi penyakit hewan menular strategis 36 kali pertahun	Cukup Jelas		Dinas Pertanian	-
			Tingkat angka kelahiran IB sapi potong 60% pertahun	Cukup Jelas		Dinas Pertanian	-
			Produksi daging meningkat 2,7% pertahun (ton)	Cukup Jelas			-
			Produksi Telur meningkat 1% pertahun (ton)	Cukup Jelas		Dinas Pertanian	-
			Prosentase Petani, Kelompok Wanita Tani yang mengikuti kursus/magang meningkat 65% di akhir RPJMD	Cukup Jelas			-
			Meningkatnya Prosentase realisasi LAKU SUSI	Cukup Jelas			-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya ketahanan dan stabilitas harga pangan.	Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan ditingkat lokal, regional dan nasional	PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan	Perhitungan Skor PPH sebagai berikut : Jika skor AKE > skor maks maka PPH = skor maks, selain itu PPH = skor AKE; - Skor AKE = persentase AKE x bobot; Persentase AKE = (Kalori / AKE) x 100; Sumber: aplikasi analisis PPH dengan data Susenas BPS dari BKP Kementerian Pertanian RI.		Dinas Ketahanan Pangan	-
			Jumlah Kampung Rawan Pangan	Jml. Wil. Rawan Pangan yg diintervensi/Jumlah Wilayah Rawan Pangan X 100%. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Ket: Jumlah wilayah rawan pangan di kutai barat berdasarkan hasil kajian analisa dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) tingkat desa pada 16 kecamatan terhadap skala prioritas rawan pangan (Prioritas I sangat rawan, Prioritas II rawan dan Prioritas III cukup rawan). (FSVA Food Security and Vulnerability Atlas.) Sumber data: Laporan Kajian FSVA dan Data di DKP (Seksi kerawanan Pangan).		Dinas Ketahanan Pangan	-
			Jumlah Ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten (ton beras) tercapai 100/Tahun)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten (Ton) Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM). Sumber Data: KKPP (seksi ketersediaan, kerawanan, distribusi Pangan), BPS, BULOG Provinsi.		Dinas Ketahanan Pangan	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Berkembangnya obyek dan daya tarik wisata daerah	Terwujudnya Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Pokdarwis	Meningkatnya Jumlah Pokdarwis dari 1 menjadi 16 Pokdarwis di akhir RPJMD		Dinas Pariwisata	-
		Terwujudnya Pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisata	Meningkatnya Jumlah wisatawan manca negara	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung untuk tujuan wisata ke kubar dalam satu tahun			-
			Meningkatnya jumlah wisatawan Nusantara	Jumlah wisatawan domestik yang ber kunjung untuk tujuan wisata ke kubar dalam satu tahun		Dinas Pariwisata	-
			Meningkatnya Lama Tinggal Wisnu dan Wisman	Meningkatnya Lama Tinggal 1% per tahun		Dinas Pariwisata	-
		Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Bertambahnya 1 (satu) kawasan Strategi Pariwisata (KSP) setiap tahun	Jumlah KSP tiap tahun meningkat dari 1 menjadi 6 KSP di akhir RPJMD		Dinas Pariwisata	-
		Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyelenggaraan Event kreatif (kali/ tahun)	Jumlah even yang diselenggarakan dalam satu tahun meningkat dari 1 event menjadi 6 event di akhir RPJMD		Dinas Pariwisata	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penempatan, dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta hubungan industrial yang terbina secara harmonis	Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal masyarakat	Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Jumlah yg bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$		Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	-
			Angka Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja 15 thn keatas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 thn keatas}} \times 100$		Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	-
			Menurunya Angka sengketa pengusaha – pekerja pertahun	$\frac{\text{Jumlah sengketa yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa pengusaha – pekerja}} \times 100$		Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	-
			Jumlah transmigrasi lokal	Cukup Jelas		Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	-
			Jumlah transmigrasi regional	Cukup Jelas		Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	-



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksana unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase peningkatan kualitas air	$\frac{BOD\ Tahun - N - BOD\ Tahun\ N}{BOD\ Tahun - N} \times 100\%$		Dinas Lingkungan Hidup	-
		Meningkatnya Kualitas Udara	Persentase peningkatan kualitas udara	<i>Rata – rata peningkatan kualitas udara dikalikan 100 dgn metode indeks</i>  <i>Pencemaran Udara (%)</i>		Dinas Lingkungan Hidup	-
		Meningkatnya Pengelolaan data Informasi lingkungan Hidup	Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informas lingkungan hidup yang dapat diakses 100% per tahun (perhitungan secara absolut)		Dinas Lingkungan Hidup	-
		Terpantaunya jumlah titik air yang terkonservasi	Meningkatnya Upaya perlindungan dan konservasi sumber dayaalam berbasis peran serta masyarakat	Jumlah pemantauan mata air terkonservasi 3 titik pertahun (perhitungan metode akumulasi)		Dinas Lingkungan Hidup	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;  
 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Penanaman modal, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;  
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;  
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;  
 5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA SKPD					
1.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan hampir miskin.	Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin.	Prosentase penduduk miskin.	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah penduduk Kutai Barat}} \times 100 \%$		Dinas Sosial	-
		Meningkatnya Potensi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberi Bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang harus menerima bantuan}} \times 100\%$		Dinas Sosial	-
		Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan social untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan kebutuhan dasar}} \times 100\%$		Dinas Sosial	-
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PKS)	Prosentase PSKS yang mendapatkan Pelatihan penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$		Dinas Sosial	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- TUGAS : Melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- FUNGSI : 1. Penyiapan Bahan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain di daerah yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
2. Penyiapan bahan pelaksana pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang berada di daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat)

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Terselenggaranya upaya penanggulanagn bencana daerah secara efisien dan efektif.	Upaya Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dengan mengedepankan upaya pencegahan dini dengan penanggulangan korban bencana secara cepat dan tepat	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman} (< 1 \text{ jam setelah pengaduan})}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100$		Badan penanggulanagn Bencana Daerah	-
			Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran}}{\text{Jumlah Penduduk yang bisa dijangkau pelayanan PMK}} \times 100\%$		Badan penanggulanagn Bencana Daerah	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 – 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebakaran.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIPACU					
1.	Terciptanya rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat.	Menciptakan rasa aman, toleransi, saling pengertian dan dalam golongan kehidupan bermasyarakat .	Jumlah Demo	Jumlah Demo dalam 1 tahun		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Jumlah Linmas per.10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah anggota Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kampung	$\frac{\text{Jumlah Pos Siskamling}}{\text{Jumlah Kampung/kelurahan}}$		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Angka Kriminalitas yang tertangani				-
			Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	$\frac{\text{Jumlah Ketepatan waktu tindakan PMK} (< 1 \text{ jam pengaduan})}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}}$			-
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	$\frac{\text{Luas WMK Kabupaten}}{\text{Potensi ancaman Kebakaran}} \times 100\%$			-
			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	$\frac{\text{anggota Damkar yg bersertifikasi}}{\text{Jumlah anggota Damkar}} \times 100\%$			-
			Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5.000 liter pada WMK		Cukup jelas		-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
- TUGAS : Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan kampung dan kelurahan, pembangunan dan kerjasama kampung serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pemerintahan kampung dan kelurahan, pembangunan dan kerjasama kampung serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan kampung dan kelurahan, pembangunan dan kerjasama kampung serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA					
1.	Terciptanya partisipasi dan peran aktif pemuda, perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Jumlah Kampung yang melaksanakan Penataan Ruang Kampung	$\frac{\text{Jumlah Kampung yg melaksanakan Penataan Ruang}}{\text{Jumlah Kampung}}$		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
			Jumlah Kampung yang melakukan Kerja Sama Kampung	$\frac{\text{Jumlah Kampung yg melakukan Kerjasama}}{\text{Jumlah Kampung}}$		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
			Jumlah Pengurus PKK Kampung yang dibina	$\frac{\text{Jumlah PKK Kampung yg dibina}}{\text{Jumlah PKK Kampung Keseluruhan}} \times 100$		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
			Bertambahnya Jumlah pembentukan BUMK	Cukup jelas		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
			Prosentase Dana Desa/ (Kampung)/ (DK) sesuai peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah kampung yg melaksanakan DK yg sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah Kampung yg menerima DK}} \times 100\%$		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
			Prosentase Kampung/Kelurahan yang tertib Administrasi	$\frac{\text{Jumlah kampung & Kelurahan yg tertib administrasi}}{\text{Jumlah Kampung & Kelurahan}} \times 100\%$		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH

: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TUGAS

: Membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA					
1.	Terciptanya partisipasi dan peran aktif pemuda, perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina}}{\text{Jumlah organisasi pemuda keseluruhan}} \times 100\%$		Dinas Pemuda dan Olahraga	-
			Persentase jumlah sentra pemberdayaan pemuda (Jumlah komulatif kelompok kepemudaan yang mejadi sentra pemberdayaan pemuda) meningkat 10% per tahun	$\frac{\text{Jumlah sentra pemberdayaan pemuda aktif}}{\text{Jumlah sentera pemberdayaan pemuda keseluruhan}} \times 100\%$		Dinas Pemuda dan Olahraga	-
			Persentase jumlah cabang olah raga berprestasi	$\frac{\text{Jumlah cabor berprestasi}}{\text{Jumlah cabor keseluruhan}} \times 100\%$		Dinas Pemuda dan Olahraga	-
			Meningkatnya jumlah perolehan medali emas dalam kejurnas	$\text{Jumlah medali emas yang diperoleh } n - 1$		Dinas Pemuda dan Olahraga	-
			Meningkatnya jumlah sarana olahraga	Jumlah sarana; olah raga yang dibangun		Dinas Pemuda dan Olahraga	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

- NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan perikanan serta pengelolaan sumber daya dan daya saing produk perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan serta pengelolaan sumber daya dan daya saing produk perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan perikanan serta pengelolaan sumber daya dan daya saing produk perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam artian luas dalam perekonomian Kutai Barat	Terselenggaranya Tata Kelola Pemafaatan Sumberdaya Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan.	Luas Kawasan Budidaya Air Tawar	Meningkatnya Luas Kawasan Budidaya Air Tawar 1 Ha tiap Tahun		Dinas Perikanan	-
			Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	Meningkatnya Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan 1 Kawasan Tiap Tahun		Dinas Perikanan	-
		Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang partisipasif bertanggungjawab dan berkelanjutan.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah Ikan Tangkap 100 Ton tiap Tahun		Dinas Perikanan	-
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Jumlah Budi daya 1.000 Ton tiap Tahun		Dinas Perikanan	-
			Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Produksi Ikan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Produksi Perikanan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebanyak 150 Orang Tiap Tahun		Dinas Perikanan	-
			Meningkatnya Pendampingan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Produksi Ikan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Produksi Perikanan yang didampingi sebanyak 75 Orang Tiap Tahun		Dinas Perikanan	-
		Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan perkapita	Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan	Produksi Ikan Tangkap + Produksi Ikan Budidaya + Jumlah Ikan Impor - Jumlah Ikan Ekspor/Jumlah Penduduk (Jumlah Konsumsi Ikan Per kg/Kapita/Tahun)		Dinas Perikanan	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR

TUGAS : 1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berupaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat serta mendukung keberhasilan upaya kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian dan upaya pelayanan kesehatan terpadu.  
2. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

FUNGSI : Menyusun kebijakan teknis, perencanaan, pengelolaan ataupun evaluasi dan pembinaan yang meliputi:  
1. Pelayanan Medis  
2. Pelayanan penunjang medic dan non medik;  
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;;  
4. Pelayanan rujukan;  
5. Pendidikan dan pelatihan;  
6. Penelitian dan pengembangan;  
7. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Meningkatnya Kesehatan masyarakat	Derajat Meningkatnya akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Kunjungan Rawat Jalan	Cukup jelas		RSUD HIS	
			Kunjungan Rawat Inap	Cukup jelas		RSUD HIS	
			BOR (Bed Occupancy Rate/Angka Penggunaan Tempat Tidur)	Cukup jelas		RSUD HIS	
			ALOS (Average Length Stay/Rata-rata Lamanya Pasien Dirawat)	Cukup jelas		RSUD HIS	
			NDR (Net Death Rate)	Cukup jelas		RSUD HIS	
			Jumlah complain Masyarakat tentang pengelolaan kesehatan yang ditindaklanjuti	Cukup Jelas		RSUD HIS	



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 - 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

TUGAS : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;  
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;  
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;  
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
1.	Terselenggaranya Pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel serta membaiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional (APF) pemerintah yang berkualitas	Peningkatan Level APIP	Meningkatnya Level APIP dari 2 menjadi 3		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Prosentase APF yang bersertifikat	Cukup jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Cukup jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Hasil Evaluasi SAKIP	Cukup jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-

		Terwujudnya Pengawasan efektifitas	Pencapaian Level SPIP	Cukup jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Persentase Jumlah PD yg menerapkan SPIP	Cukup Jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Persentase realisasi kegiatan pengawasan dan LHP/LHE/LHR yang terbit dari perencanaan	Cukup Jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Cukup Jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Status Penyelesaian Tindaklanjuti	Cukup Jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-
			Tindak lanjut Rekomendasi atas Evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan	Cukup Jelas		INSPEKTORAT KABUPATEN	-

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005